

ECONOMIC AND POLICY FACTORS AFFECTING PALM OIL EXPORT VALUE IN RIAU PROVINCE

FAKTOR-FAKTOR EKONOMI DAN KEBIJAKAN YANG MEMPENGARUHI NILAI EKSPOR MINYAK SAWIT DI PROVINSI RIAU

Rini Nizar^{1a}, Erick Gunawan Bahar¹

¹Universitas Lancang Kuning, Indonesia

^a Korespondensi: Rini Nizar, [Email: rininizar@gmail.com](mailto:rininizar@gmail.com)

(Diterima: 05-02-2026; Ditelaah: 16-02-2026; Disetujui: 07-03-2026)

ABSTRACT

The palm oil industry is a strategic sector in Indonesia's economy that contributes significantly to national income, employment creation, and energy diversification. Riau Province, as one of the largest producers of crude palm oil (CPO), plays an important role in supporting Indonesia's export performance. However, fluctuations in export value are influenced by various internal and external factors, including international prices, exchange rates, land area, production volume, and government policies. This study aims to analyze the influence of economic factors and regulatory policies on the export value of CPO at both the provincial (Riau) and national levels. The research applies a multiple linear regression model using annual secondary data from 2013 to 2022 obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Directorate General of Plantations, and the World Bank. The results show that international prices and land area significantly affect CPO export value, while production and exchange rates have no significant influence. Strategic policies such as the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification, moratorium on new permits, and fiscal incentives have a positive but statistically insignificant short-term impact. The findings imply that Indonesia's CPO export growth is mainly driven by global market dynamics and land capacity. Therefore, consistent and integrated sustainable policy support is essential to enhance competitiveness and ensure long-term export stability.

Keywords: Export; international price; land area; palm oil; policy regulation.

ABSTRAK

Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, serta diversifikasi energi. Provinsi Riau, sebagai salah satu produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar, memiliki peran penting dalam mendukung kinerja ekspor Indonesia. Namun demikian, fluktuasi nilai ekspor dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain harga internasional, nilai tukar, luas lahan, volume produksi, serta kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor ekonomi dan kebijakan regulasi terhadap nilai ekspor CPO baik pada tingkat provinsi (Riau) maupun nasional. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan memanfaatkan data sekunder tahunan periode 2013–2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga internasional dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO, sementara produksi dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan. Kebijakan strategis seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium izin baru, serta insentif fiskal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik dalam jangka pendek. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekspor CPO Indonesia terutama didorong oleh dinamika pasar global dan kapasitas lahan. Oleh karena itu, dukungan kebijakan berkelanjutan yang konsisten dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing serta menjamin stabilitas ekspor dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Ekspor; harga internasional; kelapa sawit; luas lahan; regulasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit telah lama diakui sebagai salah satu sektor paling strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selama dua dekade terakhir, kelapa sawit memainkan peran ganda, yaitu memenuhi kebutuhan industri domestik baik untuk produk pangan maupun nonpangan, sekaligus menjadi komoditas ekspor utama yang menghasilkan devisa negara dalam jumlah besar (Zuhdi et al., 2021). Selain kontribusi ekonominya, kelapa sawit juga mendukung ketahanan energi nasional melalui kebijakan mandatori biodiesel, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta mendorong diversifikasi energi terbarukan (Saragih, Rachmina, & Krisnamurthi, 2020; Teguh et al., 2024).

Pada tahun 2019, nilai ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai sekitar Rp304 triliun, melampaui sektor minyak dan gas sebagai penyumbang devisa terbesar nasional (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020; Pahan, 2015). Industri ini memberikan manfaat makroekonomi dan mikroekonomi yang signifikan, mengingat sekitar 41% dari total luas perkebunan dikelola oleh pekebun rakyat dan mampu menyerap lebih dari 4,6 juta tenaga kerja (Firmansyah et al., 2022). Hingga tahun 2024, Indonesia tetap menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan volume ekspor mencapai 26,33 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD 28,45 miliar, setara dengan 11,6% dari total ekspor nonmigas nasional (Purnama, 2024; World Bank Group, 2024). Secara keseluruhan, sektor kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung menyerap lebih dari 16,2 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Provinsi Riau menempati posisi sentral dalam rantai pasok kelapa sawit Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap produksi nasional dan kinerja ekspor. Subsektor perkebunan

menyumbang sekitar 15,81% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau dan mencapai 64,03% dari total output sektor pertanian (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024). Namun demikian, kinerja ekspor kelapa sawit di provinsi ini menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh variasi harga internasional (Wiebe & Garcia, 2019), nilai tukar (Monetary Authority of Singapore, 2021), luas lahan (Yamani, Nasution, & Ruslan, 2024), tingkat produktivitas (Purba & Sipayung, 2017), infrastruktur logistik, serta kebijakan perdagangan pemerintah (Pusdatin Kementan, 2024).

Dari perspektif kebijakan, pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 telah mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Kebijakan tersebut meliputi penerapan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit, serta sejumlah insentif fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong keberlanjutan lingkungan. Meskipun kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memperkuat daya saing ekspor dan meningkatkan citra keberlanjutan industri kelapa sawit, dampak empiris regulasi tersebut terhadap kinerja ekspor masih relatif terbatas untuk dikaji secara mendalam (Putri et al., 2022).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas determinan ekspor kelapa sawit, terutama yang berkaitan dengan harga global, kapasitas produksi, dan fluktuasi nilai tukar (Ridwannulloh & Sunaryati, 2018; Ulfah, Ismono, & Murniati, 2019; Rosyadi et al., 2021). Namun, masih sedikit penelitian yang menganalisis secara simultan pengaruh faktor-faktor ekonomi dan intervensi kebijakan pada tingkat regional dan nasional. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung memperlakukan variabel kebijakan sebagai faktor latar belakang kualitatif, bukan sebagai determinan kuantitatif, sehingga menyisakan kesenjangan dalam pemahaman

mengenai bagaimana intervensi pemerintah seperti standar sertifikasi, tarif ekspor, dan insentif fiskal diterjemahkan ke dalam kinerja ekspor yang terukur.

Lebih lanjut, dinamika permintaan internasional, khususnya dari negara-negara pengimpor utama seperti India, Tiongkok, dan Uni Eropa, turut menambah volatilitas kinerja perdagangan kelapa sawit Indonesia (World Bank Group, 2024). Peningkatan ketatnya standar keberlanjutan global, seperti penerapan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR), menghadirkan tantangan baru bagi daya saing ekspor Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana kebijakan domestik Indonesia selaras dengan perubahan struktur pasar global dan tuntutan perdagangan berbasis lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis empiris yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi internal berinteraksi dengan regulasi pemerintah dalam memengaruhi nilai ekspor kelapa sawit. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti determinan ekonomi secara terpisah atau menempatkan variabel kebijakan sebagai konteks kualitatif, penelitian ini secara eksplisit mengintegrasikan faktor ekonomi dan instrumen kebijakan pemerintah ke dalam satu kerangka analisis kuantitatif yang terpadu. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menguji secara simultan pengaruh variabel ekonomi pasar dan intervensi kebijakan terhadap kinerja ekspor kelapa sawit pada dua level analisis, yaitu tingkat regional (Provinsi Riau) dan tingkat nasional. Pendekatan ini masih relatif jarang dilakukan dalam kajian ekonomi kelapa sawit di Indonesia, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara dinamika pasar, regulasi pemerintah, dan kinerja ekspor komoditas strategis tersebut.

Secara khusus, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Faktor-faktor ekonomi apa saja seperti produksi, nilai tukar, luas lahan, dan harga internasional yang memengaruhi nilai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Provinsi Riau?
2. Sejauh mana harga internasional dan kebijakan strategis pemerintah memengaruhi kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia pada tingkat nasional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan data runtun waktu (time series) periode 2013–2022, sehingga memungkinkan analisis pada dua tingkat, yaitu tingkat provinsi dan nasional.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur perdagangan pertanian dengan mengintegrasikan determinan ekonomi dan kebijakan dalam satu model analisis. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan mengenai bagaimana faktor ekonomi dan mekanisme regulasi secara bersama-sama membentuk kinerja ekspor. Dari sudut pandang kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing jangka panjang Indonesia di pasar global kelapa sawit.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor ekonomi dan regulasi kebijakan pemerintah terhadap nilai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) baik pada tingkat provinsi (Riau) maupun nasional. Pendekatan kuantitatif dianggap tepat karena memungkinkan pengukuran hubungan kausal antara berbagai variabel ekonomi melalui penggunaan data numerik dan inferensi statistik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada periode

November 2024 hingga Maret 2025, yang merepresentasikan pusat administrasi dan ekonomi industri kelapa sawit di provinsi tersebut. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu (time series) tahunan selama periode 2013–2022. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian), Kementerian Perdagangan, World Bank, serta basis data International Financial Statistics (IFS). Seluruh sumber data merupakan publikasi resmi sehingga menjamin validitas dan reliabilitas data untuk analisis empiris.

Pada tingkat provinsi (Riau), variabel dependen yang digunakan adalah nilai ekspor CPO (dalam juta USD), sedangkan variabel independen meliputi produksi CPO (dalam ribu ton), luas lahan (dalam ribu hektare), nilai tukar (Rp/USD), dan harga internasional CPO (USD/ton). Hubungan antarvariabel tersebut dianalisis menggunakan model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Di mana Y merepresentasikan nilai ekspor CPO, X_1 adalah volume produksi, X_2 adalah nilai tukar, X_3 adalah luas lahan, X_4 adalah harga internasional, dan ε merupakan komponen galat acak (random error term).

Pada tingkat nasional, analisis memasukkan variabel kebijakan dalam bentuk variabel dummy (D) untuk menangkap pengaruh regulasi strategis pemerintah seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium penerbitan izin baru perkebunan, serta insentif fiskal terhadap kinerja ekspor CPO Indonesia. Model pada tingkat nasional dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 D + \varepsilon$$

Di mana $D = 1$ menunjukkan tahun-tahun diberlakukannya kebijakan regulasi utama kelapa sawit, dan $D = 0$ untuk tahun-tahun lainnya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang didukung oleh perangkat lunak Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistics. Analisis ini melibatkan beberapa uji statistik, yaitu:

1. uji t , untuk mengukur pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen;
2. uji F , untuk menilai signifikansi simultan seluruh variabel dalam model; dan
3. koefisien determinasi (R^2), untuk mengevaluasi proporsi variasi nilai ekspor yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen.

Seluruh pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($p < 0,05$). Asumsi-asumsi regresi meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi diperiksa untuk memastikan validitas model.

Untuk variabel dummy kebijakan, interpretasi kontekstual dilakukan dengan mencocokkan waktu penerapan kebijakan pemerintah dengan fluktuasi kinerja ekspor yang terjadi selama periode penelitian. Hal ini memungkinkan penilaian terhadap dampak kebijakan baik dalam jangka pendek maupun potensi dampak tertunda (lagged effects).

Penelitian ini tidak melibatkan partisipasi manusia secara langsung karena seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi terbuka; oleh karena itu, persetujuan etik tidak diperlukan. Meskipun demikian, desain penelitian dan prosedur analisis data tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akurasi, dan reproduisibilitas.

Secara keseluruhan, desain metodologis penelitian ini memungkinkan pengkajian pengaruh gabungan antara dinamika pasar (melalui variabel ekonomi) dan intervensi kelembagaan (melalui kebijakan pemerintah) dalam menentukan kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia pada berbagai tingkat spasial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia menunjukkan bahwa berbagai faktor ekonomi dan kebijakan secara simultan memengaruhi nilai ekspor dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Model regresi yang mengkaji data pada tingkat provinsi di Provinsi Riau menunjukkan daya jelaskan yang kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R-squared sebesar 0,975 dan Multiple R sebesar 0,988, yang mengindikasikan bahwa 97,5% variasi nilai ekspor CPO dapat dijelaskan oleh pengaruh gabungan volume produksi, nilai tukar, luas lahan, dan harga internasional. Hasil uji F secara keseluruhan ($p = 0,000$) mengonfirmasi signifikansi statistik model, yang berarti bahwa setidaknya terdapat satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO.

Determinan Nilai Ekspor CPO pada Tingkat Provinsi

Hasil analisis regresi non-linear berganda mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai ekspor crude palm oil (CPO) di tingkat Provinsi Riau disajikan pada Tabel 1.

$$Y = 0,895 \cdot X_1 - 1,464 \cdot X_2 + 0,632 \cdot X_3 + 1,818 \cdot X_4 + 0,767 \cdot e$$

Ket:

- X_1 = Produksi CPO Perkebunan Rakyat
- X_2 = Nilai Tukar
- X_3 = Luas Lahan
- X_4 = Rata-rata Harga Internasional

Tabel 1. Analisis Regresi Non-Linear Berganda Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Ekspor CPO

	Coef.	SE	T	P> t
Intercept	0,895	0,972	0,920	0,400
Produksi CPO	-1,464	0,652	-2,245	0,075
Perkebunan Rakyat	0,632	0,364	1,736	0,143
Nilai Tukar	1,818	0,696	2,610	0,048
Rata-rata Harga Internasional	0,767	0,069	11,091	0,000
<i>Regression Statistics</i>				
Multiple R				0,988
R Square				0,975
Adjusted R Square				0,955
Standard Error				0,021
Observations				10

Source: Primary data (2025)

Tabel tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi, standar error, nilai t-statistic, serta tingkat signifikansi masing-masing variabel independen yang digunakan dalam model penelitian. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat diidentifikasi pengaruh relatif dari variabel produksi CPO perkebunan rakyat, nilai tukar, luas lahan, serta harga internasional terhadap nilai ekspor CPO.

Koefisien regresi untuk variabel volume produksi bernilai negatif (-1,464) dengan nilai p-value sebesar 0,075, yang menunjukkan bahwa produksi dari perkebunan rakyat cenderung memiliki hubungan berlawanan arah dengan nilai ekspor, meskipun hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi domestik, khususnya dari pekebun rakyat, tidak serta-merta diterjemahkan ke dalam peningkatan kinerja ekspor. Penjelasan yang paling memungkinkan berkaitan dengan relatif rendahnya kualitas produksi pekebun rakyat dibandingkan dengan perkebunan skala besar, sehingga membatasi kelayakan ekspor (Napitupulu et al., 2019). Selain itu, kelebihan pasokan domestik tanpa diimbangi dengan kapasitas ekspor yang memadai dapat menekan harga domestik dan mengurangi insentif ekspor (Panjaitan, Paman, & Darus, 2020). Hasil ini sejalan dengan Ridwannulloh dan Sunaryati (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan produksi harus disertai

dengan perbaikan logistik, kapasitas pengolahan, serta permintaan internasional agar dapat secara efektif meningkatkan ekspor.

Variabel nilai tukar menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan ($\beta = 0,632$; $p\text{-value} = 0,143$), yang mengimplikasikan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak memiliki dampak langsung atau konsisten terhadap nilai ekspor CPO. Meskipun pelemahan nilai tukar rupiah pada umumnya meningkatkan daya saing ekspor melalui konversi nilai tukar yang lebih menguntungkan, hasil ini menunjukkan adanya faktor-faktor penyeimbang, seperti variabilitas permintaan global dan pembatasan ekspor domestik (Ridwannulloh & Sunaryati, 2018). Dalam jangka pendek, eksportir cenderung memprioritaskan penjualan domestik akibat ketidakpastian kebijakan atau stabilitas harga, sehingga mengurangi responsivitas terhadap pergerakan nilai tukar.

Sebaliknya, variabel luas lahan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan ($\beta = 1,818$; $p\text{-value} = 0,048$). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan areal budidaya kelapa sawit memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pertumbuhan nilai ekspor. Menurut Panjaitan et al. (2020), peningkatan luas perkebunan—terutama melalui skema pekebun rakyat yang terorganisasi—dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan kapasitas pasokan pasar. Perluasan lahan umumnya disertai dengan praktik pengelolaan kebun yang lebih baik serta peningkatan akses ke pasar ekspor, sehingga memperkuat signifikansinya terhadap kinerja perdagangan CPO.

Variabel harga internasional CPO muncul sebagai faktor yang paling dominan, dengan koefisien positif ($\beta = 0,767$) dan nilai $p\text{-value}$ yang sangat signifikan (0,000). Hal ini menegaskan bahwa harga pasar global sangat menentukan kinerja ekspor CPO Indonesia,

sejalan dengan temuan Ulfah, Ismono, dan Murniati (2019). Ketika harga internasional meningkat, penerimaan ekspor Indonesia turut meningkat mengingat Indonesia merupakan salah satu pemasok terbesar di dunia. Hubungan ini menyoroti sifat ekspor Indonesia yang sangat bergantung pada komoditas, di mana kinerja ekspor CPO lebih didorong oleh faktor harga dibandingkan dengan faktor produktivitas. Rosyadi et al. (2021) juga menekankan bahwa pertumbuhan ekspor pada periode harga tinggi mencerminkan elastisitas permintaan global, khususnya dari negara-negara pengimpor utama seperti India, Tiongkok, dan Pakistan.

Analisis Tingkat Nasional: Peran Regulasi Kebijakan Strategis

Hasil estimasi regresi non-linear berganda pada tingkat nasional yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang relatif tinggi. Model regresi pada tingkat nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 4,535 \cdot X_1 + 0,052 \cdot X_2 + 0,944 \cdot e$$

Tabel 2. Analisis Regresi Non-Linear Berganda Peran Regulasi Kebijakan Terhadap Nilai Ekspor CPO

	<i>Coef.</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>P> t </i>
Intercept	4,535	0,359	12,631	0,000
Regulasi Kebijakan	0,052	0,025	2,042	0,081
Harga Internasional	0,944	0,124	7,604	0,000
<i>Regression Statistics</i>				
Multiple R				0,945
R Square				0,893
Adjusted R Square				0,862
Standard Error				0,038
Observations				10

Source: Primary data (2025)

Analisis regresi pada tingkat nasional memasukkan variabel dummy (D) yang merepresentasikan intervensi regulasi utama, seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium penerbitan izin baru perkebunan, serta insentif fiskal. Berdasarkan hasil pada Tabel 2, model menghasilkan nilai Multiple R sebesar 0,945

dan R-squared sebesar 0,893, yang menunjukkan bahwa sekitar 89,3% variasi nilai ekspor CPO nasional Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang terdapat dalam model. Nilai statistik F secara keseluruhan (29,081; $p = 0,000$) mengonfirmasi bahwa model bersifat signifikan secara statistik.

Lebih lanjut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, variabel harga internasional kembali menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap nilai ekspor CPO nasional dengan koefisien positif ($\beta = 0,944$; $p = 0,000$), yang menegaskan perannya sebagai pendorong utama kinerja ekspor pada tingkat global. Variabel dummy kebijakan menunjukkan koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik ($\beta = 0,052$; $p = 0,081$), sebagaimana tercantum dalam Tabel 2, yang mengindikasikan bahwa regulasi pemerintah belum menghasilkan dampak jangka pendek yang terukur terhadap nilai ekspor. Namun demikian, koefisien yang positif menunjukkan bahwa arah pengaruhnya sejalan dengan tujuan kebijakan, sehingga mengisyaratkan adanya potensi manfaat jangka panjang seiring dengan semakin matangnya implementasi kebijakan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan Tandra et al. (2023) dan Putri et al. (2022), yang menyatakan bahwa efektivitas langkah-langkah regulasi seperti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan insentif fiskal sangat bergantung pada koordinasi kelembagaan, pengakuan internasional, serta tingkat kepatuhan di kalangan produsen. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut mendorong keberlanjutan dan keterlacakan, dampaknya terhadap nilai ekspor masih relatif terbatas karena penerimaan pasar khususnya di Uni Eropa dalam kerangka Deforestation-Free Regulation (EUDR) masih belum optimal (European Commission, 2023).

Interpretasi dan Implikasi Kebijakan

Dampak statistik yang tidak signifikan dari variabel kebijakan tidak

serta-merta menunjukkan kegagalan kebijakan; sebaliknya, hal tersebut mengindikasikan adanya policy lag, mengingat reformasi kelembagaan umumnya memerlukan waktu sebelum menghasilkan dampak ekonomi yang terukur (Saragih et al., 2020). Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), misalnya, masih bersifat sebagian administratif, dengan cakupan sertifikasi yang baru mencapai sekitar 40% dari total luas perkebunan nasional hingga tahun 2023 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2023). Selain itu, implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sering kali belum terkoordinasi secara optimal, sehingga menghasilkan capaian kebijakan yang terfragmentasi (Syahza et al., 2022).

Beberapa penjelasan struktural dan kontekstual berikut ini semakin memperjelas temuan penelitian:

1. Implementasi yang Belum Optimal: Penegakan ISPO belum sepenuhnya didorong oleh mekanisme pasar dan masih kurang memiliki kredibilitas global dibandingkan dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sehingga membatasi kemampuannya dalam menghasilkan premi ekspor (Purnomo et al., 2023).
2. Efek Keterlambatan Kebijakan (Policy Lag): Kebijakan fiskal seperti PMK Nomor 191/2020 yang menurunkan pungutan ekspor mulai menunjukkan dampak setelah industri melakukan penyesuaian, sehingga respons terhadap kinerja ekspor terjadi secara tertunda (BPDPKS, 2023).
3. Fragmentasi Kelembagaan: Lemahnya koordinasi antar-kementerian menghambat koherensi kebijakan dan melemahkan dampak regulasi (Napitupulu et al., 2019).
4. Ketergantungan Eksternal: Nilai ekspor masih sangat bergantung pada

permintaan global, sehingga menutupi pengaruh kebijakan domestik (World Bank, 2024; Teguh et al., 2024).

5. Persepsi Internasional: Keterbatasan pengakuan ISPO di pasar Eropa membatasi akses Indonesia terhadap jalur perdagangan hijau dan skema penetapan harga berbasis nilai tambah (Hidayat et al., 2022).

Implikasi ekonomi dari temuan ini bersifat multidimensional. Pertama, rendahnya signifikansi variabel regulasi mengindikasikan bahwa efisiensi ekonomi sektor kelapa sawit masih belum optimal, karena produsen belum sepenuhnya menginternalisasi insentif keberlanjutan. Kedua, Indonesia berisiko kehilangan daya saing global apabila kinerja ekspor terus bergantung pada harga dan volume, alih-alih pada nilai tambah atau sertifikasi keberlanjutan (Tandra et al., 2023). Ketiga, dari perspektif fiskal, implementasi kebijakan yang kurang efektif mencerminkan hilangnya peluang optimalisasi devisa, mengingat kepatuhan yang lebih kuat terhadap standar keberlanjutan berpotensi meningkatkan nilai ekspor sebesar 3–5% per tahun (BPDPKS, 2023).

Dari sudut pandang kebijakan, temuan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi fiskal hijau melalui pemberian insentif pajak bagi eksportir tersertifikasi, subsidi logistik untuk perdagangan berkelanjutan, serta penguatan diplomasi perdagangan guna memperoleh pengakuan internasional yang lebih luas terhadap standar ISPO (Purnama, 2024). Penguatan koordinasi antar-lembaga domestik dan konsistensi implementasi kebijakan menjadi kunci utama dalam mentransformasikan kerangka regulasi menjadi daya saing ekspor yang nyata.

Ringkasan Temuan

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa harga internasional CPO tetap menjadi determinan paling signifikan terhadap kinerja ekspor,

sementara perluasan luas lahan juga memberikan kontribusi positif. Peran volume produksi dan nilai tukar secara statistik tidak signifikan, namun tetap relevan secara ekonomi dalam kondisi tertentu. Kebijakan pemerintah, meskipun memiliki hubungan positif dengan nilai ekspor, belum menunjukkan signifikansi statistik dalam jangka pendek akibat kendala administratif dan struktural.

Pada intinya, kinerja ekspor CPO Indonesia masih didominasi oleh mekanisme pasar, yang dipengaruhi oleh siklus komoditas global dan kapasitas sumber daya lahan, dibandingkan oleh inisiatif regulasi domestik. Peningkatan nilai ekspor di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan keberlanjutan dengan mekanisme pasar internasional serta memperkuat koordinasi kelembagaan guna mendukung industri kelapa sawit yang lebih efisien, berdaya saing, dan bertanggung jawab secara lingkungan.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian serta pembahasan mengenai faktor ekonomi dan kebijakan yang memengaruhi nilai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Provinsi Riau dan Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi nilai ekspor CPO di Provinsi Riau terutama ditentukan oleh harga internasional CPO dan luas lahan perkebunan kelapa sawit. Harga internasional terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO, baik pada tingkat provinsi maupun nasional, yang menunjukkan bahwa dinamika pasar global merupakan determinan utama dalam pembentukan kinerja ekspor. Selain itu, luas lahan perkebunan kelapa sawit juga berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor CPO di Provinsi Riau, yang mencerminkan bahwa kapasitas produksi regional masih menjadi faktor

penting dalam mendorong kinerja ekspor. Sementara itu, variabel volume produksi dan nilai tukar tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, yang mengindikasikan bahwa peningkatan produksi dan fluktuasi nilai tukar belum secara langsung mampu meningkatkan ekspor tanpa didukung oleh efisiensi rantai pasok, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar internasional yang lebih luas.

2. Pada tingkat nasional, harga internasional CPO terbukti menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor, sedangkan variabel kebijakan pemerintah yang direpresentasikan oleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium izin perkebunan, dan insentif fiskal menunjukkan pengaruh positif namun belum signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam sektor kelapa sawit cenderung memberikan dampak dalam jangka panjang dan memerlukan konsistensi implementasi serta penguatan koordinasi kelembagaan agar dapat memberikan pengaruh yang lebih nyata terhadap kinerja ekspor.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Pemerintah daerah maupun pusat perlu memfokuskan kebijakan pada peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, khususnya pada sektor perkebunan rakyat, melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR), penyediaan bibit unggul, serta peningkatan akses terhadap teknologi budidaya dan pembiayaan.
2. Pemerintah perlu memperkuat efisiensi rantai pasok dan infrastruktur logistik, seperti transportasi dan pelabuhan ekspor,

agar biaya distribusi dapat ditekan dan daya saing ekspor meningkat.

3. Implementasi sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan proses sertifikasi bagi pekebun kecil, serta peningkatan pengakuan internasional terhadap standar keberlanjutan Indonesia.
4. Pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi perdagangan internasional untuk merespons meningkatnya standar keberlanjutan global, seperti regulasi European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR), sehingga akses pasar ekspor kelapa sawit Indonesia tetap terjaga dan kompetitif di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2023). Laporan tahunan BPDPKS 2023. BPDPKS.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Statistik kelapa sawit Indonesia (Vol. 17). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2024). Provinsi Riau dalam angka 2024. BPS Provinsi Riau.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020). Data dan fakta sawit Indonesia: Luas, sebaran dan tantangannya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2023). Statistik perkebunan Indonesia 2023: Kelapa sawit. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Diyanti, P., & Suriyanti, L. H. (2024). Pengaruh strategic costing dan competitive environment terhadap kinerja perusahaan crude palm oil (CPO) di Riau. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(2), 174–187.
- European Commission. (2023). Regulation on deforestation-free products

- (EUDR). European Commission.
- Firmansyah, E., Mawandha, H. G., Umami, A., Nurjanah, D., Dinarti, S. I., Puruhito, D. D., & Purwadi. (2022). *Pengelolaan peremajaan kelapa sawit*. Instiper Press.
- Hidayat, R., & Harahap, N. (2021). Evaluasi implementasi moratorium izin sawit di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Agraria*, 15(2), 88–102.
- Hidayat, R., Marzuki, A., & Lestari, T. (2022). Perbandingan sertifikasi ISPO dan RSPO dalam perspektif pasar global. *Jurnal Agroindustri Berkelanjutan*, 10(1), 35–47.
- Juliprijanto, W., Prasetyanto, P. K., & Setiawan, A. D. (2022). Analysis of determinants of palm oil exports in Indonesia. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 18(1), 1–10.
<https://doi.org/10.30872/jinv.v18i0.11242>
- Monetary Authority of Singapore. (2021). MAS annual report 2021/2022: Exchange rate as the primary monetary policy tool. MAS.
- Napitupulu, T. S., Bakce, D., Syahza, A., Asmit, B., & Hadi, S. (2019). Model penawaran dan permintaan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. *Dinamika Pertanian*, 35(3), 119–128.
- Pahan, I. (2015). *Panduan teknis usaha budidaya kelapa sawit untuk praktisi perkebunan*. Penebar Swadaya.
- Purba, J. H. V., & Sipayung, T. (2017). Perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 81–94.
- Purnama, A. (2024, May 18). Peran dan kontribusi strategis kelapa sawit dalam ekonomi Indonesia. InfoSawit.
<https://www.infosawit.com>
- Faktor-Faktor Ekonomi dan Kebijakan
- Purnomo, E., Okarda, B., & Fauzi, A. (2023). Governance challenges in sustainable palm oil certification in Indonesia. *Sustainability*, 15(12), 1–15.
<https://doi.org/10.3390/su15121034>
- Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Yulian, B. E., Amalia, R., Mardiyarningsih, D. I., Kinseng, R. A., Tonny, F., Pramudya, E. P., Rahmadian, F., & Suradiredja, D. Y. (2022). The oil palm governance: Challenges of sustainability policy in Indonesia. *Sustainability*, 14(3).
<https://doi.org/10.3390/su14031820>
- Ridwannulloh, R., & Sunaryati, S. (2018). Determinants of Indonesian crude palm oil export: Gravity model approach. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(2), 134–141.
<https://doi.org/10.18196/jesp.19.2.5004>
- Rosyadi, F. H., Mulyo, J. H., Perwitasari, H., & Darwanto, D. H. (2021). Export intensity and competitiveness of Indonesia's crude palm oil to main destination countries. *Agricultural Economics*, 67(5), 189–199.
<https://doi.org/10.17221/371/2020-AGRICECON>
- Saragih, I. K., Rachmina, D., & Krisnamurthi, B. (2020). Analisis status keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat Provinsi Jambi. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(1), 17–32.
<https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.1.17-32>
- Suroso, A. I. (2022). The effect of logistics performance index indicators on palm oil and palm-based products export: The case of Indonesia and Malaysia. *Economies*, 10(10), 261.
<https://doi.org/10.3390/economies10100261>
- Tandra, H., Suroso, A. I., Syaikat, Y., & Najib, M. (2022). The determinants of competitiveness in global palm oil

- trade. *Economies*, 10(6), 132.
<https://doi.org/10.3390/economies10060132>
- Tandra, H., Suroso, A. I., Syaikat, Y., & Najib, M. (2023). Relative export competitiveness in Indonesian and Malaysian palm oil downstream products. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 20(3), 343–354.
<https://doi.org/10.17358/jma.20.3.343>
- Teguh, M., Marwa, T., Robiani, B., & Mukhlis. (2024). Prediction of Indonesian palm cooking oil exports based on competitiveness. *International Journal of Religion*, 5(10), 4819–4828.
<https://doi.org/10.61707/df547311>
- Ulfah, M., Ismono, R. H., & Murniati, K. (2019). The export performance of Indonesia's palm oil in international market. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 16(2), 140–150.
<https://doi.org/10.17358/jma.16.2.140>
- Utami, S., & Yefni. (2021). Dampak keberadaan industri kelapa sawit terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 3(4), 217–226.
<https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i4.13556>
- World Bank Group. (2024). Commodity markets outlook, April 2024. World Bank Publications.
- Zuhdi, D. A. F., Abdullah, M. F., Suliswanto, M. S. W., & Wahyudi, S. T. (2021). The competitiveness of Indonesian crude palm oil in international market. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 111–124.
<https://doi.org/10.29259/jep.v19i1.13193>